

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2019 bagi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJP, RPJM dan RKPD Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2019, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa; Dan
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2017 (n-2) ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sendiri baru terbentuk pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 6 program dan 22 kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018.

Tabel T-II.1
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*
Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Rens tra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	WAJIB										
	Adminduk dan Capil										
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat	100%						100%	100%	Disdukcapil
		Penataan Administrasi Kependudukan dan	100%						100%	100%	
		Pemanfaatan Data Kependudukan	23 Perangkat Daerah						23 Perangkat Daerah	100%	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Bahan Penyusunan DP4 terdiri dari : 1. Data Bersih, 2. Data Anomali, 3. Data Ganda Tingkat Provinsi	100%	NA	95%	95%	100%	100%	100%	100%	Disudkcapil
	Pengelolaan Data Center Kependudukan	3 Unit Server yang terpelihara	3 Unit	NA	NA	NA	NA	3 Unit	3 Unit	100%	Disudkcapil
	Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Penyelesaian Masalah PIAK & Pemanfaatan Data, Bimbingan Teknis untuk 1. Admin Database, 2. Admin Aplikasi SIAK, 3. Perangkat Keras & Jaringan Komunikasi Data 4. Laporan studi komparasi	162 Orang	NA	81 Orang	81 Orang	50%	81 Orang	162 Orang	100%	Disudkcapil
	Penyusunan dan Pencetakan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersusun dan tercetaknya Buku Agregat Per Semester,	400 Buku	NA	200 Buku	200 Buku	100%	200 Buku	400 Buku	100%	Disudkcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Rens tra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Buku Profil dan eBook									
	Pengembangan Jaringan Komunikasi Data SIAK Skala Provinsi	Tersambungnya Jaringan di 28 titik VPN selama 12 Bulan	28 Titik VPN	NA	NA	NA	NA	28	28	100%	Disudkcapil
	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Laporan Triwulanan Pengelolaan SIAK di Jawa Barat	4 Laporan	NA	2	2	100%	2	4	100%	Disudkcapil
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	PKS, Adovokasi PKS Kab/Kota, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	10 PD	NA	4	4	40%	6	10	100%	Disudkcapil
	Pengembangan Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang terintegrasi, 2. Jasa Konsultan	2 kali	NA	1	1	100%	1	2	100%	Disudkcapil
	Akselerasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak 0-18 Tahun	tercapainya penyelesaian dokumen akta pencatatan sipil bagi anak yatim	2.100 Dokumen	NA	NA	NA	NA	2100	2100	100%	Disudkcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
		Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Tercapainya penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik di Kab/Kota se Jabar	27 Kab/Kota	NA	NA	NA	27	27	100%	Disukcapil	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan	Pergub, SK Kadis dan Tindak Lanjut Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran terkait Administrasi Kependudukan	4 Kali	NA	NA	NA	4	4	100%	Disukcapil	
		Penyusunan Kebijakan Provinsi Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pergub, SK Kadis dan Tindak Lanjut Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran terkait Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	NA	NA	NA	4	4	100%	Disukcapil	
		Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Administrasi	Terseleenggaranya Penilaian Pelayanan	8 Kali	NA	4	4	100%	4	8	100%	Disukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kinerja Dinas Dukcapil dan Rekomendasi Pelaksanaan Kerja									
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR	Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah daerah									
	Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Tersedianya Jasa Penceramah, Pengajar Senam dan Pelatih, Sewa Lapangan Olahraga, Pakaian Dinas, Korpri, Olahraga dan pakaian adat	24 bln	NA	12	12	100%	12	24	100%	Dis dukcapil
	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Diklat dan Kursus	2 Tahun	NA	1	1	100%	1	2	100%	Dis dukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
		Singkat (Diklat dan Outbond)										
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
		Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Tersedianya ATK, Cetak, Fotocopy dan Penggandaan, Cinderamata	24 bln	NA	12	12	100%	12	24	100%	Disudkcapil
		Penyediaan Langganan Kantor	Terselenggaranya Langganan Internet, Surat Kabar dan TV Berbayar, Langganan Tanaman dan Pewangi Ruangan	24 bln	NA	12	12	100%	12	24	100%	Disudkcapil
		Penyediaan Jasa Kantor, Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Tersedianya jasa kantor, Sewa, Publikasi, Dokumentasi dan Tenaga Non PNS	24 bln	NA	12	12	100%	12	24	100%	Disudkcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Tersedianya Makanan dan Minum Rapat, Tamu, Lembur dan Air Galon Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	24 bln	NA	12	12	100%	12	24	100%	Disdukcapil
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
	Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	Terselenggaranya Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil
	Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama	Terselenggaranya Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil
	Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan Pembuatan Galeri Dukcapil	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Pembuatan Galeri Dukcapil									
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Terbangunnya TPT antara lahan kantor dan pemukiman warga	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	1	1	100%	Disdukcapil
	Pengadaan Mebeulair Kantor	Tersedianya Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja Rapat, kursi rapat, sofa tamu, lemari	2 kegiatan	NA	1	1	100%	1	2	100%	Disdukcapil
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Visualisasi Data Kependudukan	Tersedianya Komputer, Printer, Laptop, AC, Motion Grafik Video, Aplikasi Bussiness Intelegence (Kependudukan), peralatan KTP-el (rekam-cetak), TV Flat	2 kegiatan	NA	1	1	100%	1	2	100%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Pengadaan Data Center Kependudukan	Tersedianya Server Storage (Blade), Upgrade Storage Server	2 kegiatan	NA	1	1	50%	1	2	100%	Disdukcapil
	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
	Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Terpenuhinya Jasa Telepon, Listrik dan Air, Alat Listrik dan Elektronik, Pengisian Tabung Gas dan Galon	24 bln	NA	12 bln	12 bln	100%	12	24	100%	Disdukcapil
	Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Jaringan dan Pemeliharaan Alat	24 bln	NA	12 bln	12 bln	100%	12	24	100%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Rens tra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Perlengkapan dan Peralatan Kantor									
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional	24 bln	NA	12 bln	12 bln	100%	12	24	100%	Disdukcapil
		Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta kelengkapannya	24 bln	NA	12 bln	12 bln	100%	12	24	100%	Disdukcapil

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.
2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2018 (n-1) dan untuk tahun n-2 (2017) hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel II.2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)
2. Akurasi data kependudukan di Jawa Barat yang masih harus ditingkatkan. masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.

3. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Dukcapil Provinsi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah.
4. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri
5. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran.
6. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah
7. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah;
8. Sarana dan Prasarana kerja yang terbatas.

Tabel T-II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n- 1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2019 (n+1)	
	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi				N/A	N/A	80%	81,23%	N/A	N/A	80%	81,23%	
	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				N/A	N/A	81.12%	81,83%	N/A	N/A	81.12%	81,83%	
	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi				N/A	N/A	50%	62,50%	N/A	N/A	50%	62,50%	
	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil				N/A	N/A	80%	80,80%	N/A	N/A	80%	80,80%	

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel. T-II.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Nama OPD : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Tahap 2	Bandung	Terbangunnya tembok penahan tanah pembatas antara lahan kantor dengan pemukiman warga agar tidak terjadi longsor	100%	1.000.000.000	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Tahap 2	Bandung	Terbangunnya tembok penahan tanah pembatas antara lahan kantor dengan pemukiman warga agar tidak terjadi longsor	100%	500.000.000	
2	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Jawa Barat	Terpenuhi kebutuhan sewa, publikasi, dokumentasi kantor guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas	1 tahun	250.000.000	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Jawa Barat	Terpenuhi kebutuhan sewa, publikasi, dokumentasi kantor guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas	1 tahun	150.000.000	

3	Sinkronisasi Program Perencanaan Disdukcapil Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Selarasnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten /Kota.	27 Kab/Kota	300.000.000	Sinkronisasi Program Perencanaan Disdukcapil Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Selarasnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten /Kota.	27 Kab/Kota	150.000.000	
4	Pembinaan Aparatur Sekretariat Disdukcapil Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Meningkatkan koordinasi dan tata hubungan kerja subbagian Umum dan Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Jawa Barat	27 Kab/Kota	300.000.000	Pembinaan Aparatur Sekretariat Disdukcapil Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Meningkatkan koordinasi dan tata hubungan kerja subbagian Umum dan Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Jawa Barat	27 Kab/Kota	150.000.000	
5	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Jawa Barat	Kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan pada disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	1.500.000.000	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Jawa Barat	Kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan pada disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	1.400.000.000	
6	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	Bandung	Terpenuhinya kebutuhan langganan kantor dalam mendukung kinerja	12 Bulan	1.600.000.000	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	Bandung	Terpenuhinya kebutuhan langganan kantor dalam mendukung kinerja	12 Bulan	1.400.000.000	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Bandung	Terpenuhinya kebutuhan barang habis pakai dalam mendukung kinerja	12 Bulan	500.000.000	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Bandung	Terpenuhinya kebutuhan barang habis pakai dalam mendukung kinerja	12 Bulan	350.000.000	
8	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Bandung	Terpenuhinya fasilitas pendukung peralatan kantor	12 Bulan	350.000.000	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Bandung	Terpenuhinya fasilitas pendukung peralatan kantor	12 Bulan	250.000.000	

9	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Bandung	Terpeliharanya fasilitas Gedung dan kantor Disdukcapil Provinsi dan berfungsi secara optimal	12 Bulan	600.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Bandung	Terpeliharanya fasilitas Gedung dan kantor Disdukcapil Provinsi dan berfungsi secara optimal	12 Bulan	500.000.000	
10	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Bandung	Meningkatkan kualitas mental spiritual serta kebugaran fisik aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang ditunjang dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.	12 Bulan	450.000.000	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Bandung	Meningkatkan kualitas mental spiritual serta kebugaran fisik aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang ditunjang dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.	12 Bulan	350.000.000	
11	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Jawa Barat	Meningkatkannya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan kualitas SDM aparatur secara konsisten dalam jangka waktu 1 tahun ke depan.	12 Bulan	300.000.000	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Jawa Barat	Meningkatkannya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan kualitas SDM aparatur secara konsisten dalam jangka waktu 1 tahun ke depan.	12 Bulan	250.000.000	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan	Jawa Barat	Terpeliharanya Keamanan dan	12 Bulan	850.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan	Jawa Barat	Terpeliharanya Keamanan dan	12 Bulan	700.000.000	

	Beserta Peralatannya		Kebersihan lingkungan Disdukcapil Prov. Jawa Barat			dan Kebersihan Beserta Peralatannya		Kebersihan lingkungan Disdukcapil Prov. Jawa Barat			
13	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jawa Barat	Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional kantor,	12 Bulan	550.000.000	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jawa Barat	Terpeliharanya kendaraan dinas dan kendaraan operasional kantor,	12 Bulan	350.000.000	
14	Rehabilitasi Gedung Sekretariat	Bandung	Tertatanya gedung Sekretariat yang representatif	1 kegiatan	500.000.000	Rehabilitasi Gedung Sekretariat	Bandung	Tertatanya gedung Sekretariat yang representatif	1 kegiatan	230.000.000	
15	Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	Bandung	Tertatanya gedung Bidang FPAK yang representatif	1 kegiatan	500.000.000	Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	Bandung	Tertatanya gedung Bidang FPAK yang representatif	1 kegiatan	230.000.000	
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan pendukung kerja	1 kegiatan	800.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan pendukung kerja	1 kegiatan	782.758.935	
17	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Jawa Barat	Meningkatkan pelaporan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	1 Tahun	300.000.000	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Jawa Barat	Meningkatkan pelaporan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	1 Tahun	150.000.000	
18	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jawa Barat	Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan	12 Bulan	250.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jawa Barat	Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan	12 Bulan	200.000.000	
19	Pengelolaan Data Center Kependudukan	Jawa Barat	Optimalisasi Pengelolaan dan	12 Bln	450.000.000	Pengelolaan Data Center Kependudukan	Jawa Barat	Optimalisasi Pengelolaan dan	12 Bln	300.000.000	

			Penyajian Data Kependudukan					Penyajian Data Kependudukan			
20	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Jawa Barat	Peningkatan akurasi data kependudukan	12 Bln	400.000.000	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Jawa Barat	Peningkatan akurasi data kependudukan	12 Bln	200.000.000	
21	Penyusunan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan	Jawa Barat	Peningkatan Penyajian Data Kependudukan untuk semua keperluan	12 Bln	300.000.000	Penyusunan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan	Jawa Barat	Peningkatan Penyajian Data Kependudukan untuk semua keperluan	12 Bln	250.000.000	
22	Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Peningkatan kompetensi ADB	12 Bln	400.000.000	Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Peningkatan kompetensi ADB	12 Bln	250.000.000	
23	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aparatur pencatatan sipil dalam meningkatkan cakupan akta pencatatan sipil.	12 Bln	2.750.000.000	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aparatur pencatatan sipil dalam meningkatkan cakupan akta pencatatan sipil.	12 Bln	300.000.000	
24	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	Peningkatan tertib administrasi pendaftaran penduduk di Jawa Barat	12 Bulan	75.000.000	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	Peningkatan tertib administrasi pendaftaran penduduk di Jawa Barat	12 Bulan	300.000.000	
25	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Peningkatan tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat	1 kegiatan	2.500.000.000	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bandung	Peningkatan tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat	1 kegiatan	350.000.000	
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Internal	Bandung	Konsistensi perencanaan program dan kegiatan Dina	1 kegiatan	450.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian	Bandung	Konsistensi perencanaan program dan kegiatan Dina	1 kegiatan	200.000.000	

						Kinerja Internal					
27	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Bandung	Peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas	1 kegiatan	300.000.000	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Bandung	Peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas	1 kegiatan	150.000.000	
Jumlah					19.200.000.000					10.392.758.935	

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2019, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Disdukcapil yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Tabel. T-II.4

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	-	-	-	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 16 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISDUKCAPIL

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;

3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2019 sebanyak 4 Program sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tahun 2019 terdiri dari 26 Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor sebesar Rp. 50.000.000
2. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor sebesar Rp 1.000.000.000
3. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor sebesar Rp. 1.200.000.000
4. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor sebesar Rp. 200.000.000
5. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor sebesar Rp. 150.000.000
6. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor sebesar Rp. 200.000.000
7. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur sebesar Rp. 236.200.000
8. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur sebesar Rp. 200.000.000
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya sebesar Rp. 550.000.000
10. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 250.000.000
11. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekretariat sebesar Rp. 230.000.000
12. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK sebesar Rp. 230.000.000

13. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 400.000.000
14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data sebesar Rp. 100.000.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar Rp. 100.000.000
16. Kegiatan Pengelolaan Data Center Kependudukan sebesar Rp. 200.000.000
17. Kegiatan Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data) sebesar Rp. 100.000.000
18. Kegiatan Penyusunan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan sebesar Rp. 50.000.000
19. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 100.000.000
20. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil sebesar Rp. 150.000.000
21. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 150.000.000
22. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 157.316.000
23. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Rp. 4.142.684.000
24. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Internal sebesar Rp. 150.000.000
25. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 150.000.000
26. Kegiatan Sinkronisasi Program Perencanaan Disdukcapil Kabupaten/Kota Rp. 150.000.000

Jumlah Belanja Langsung untuk Tahun 2019 berdasarkan pagu indikatif Rp. **10.596.200.000,-** (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan dari DAK Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor sebesar Rp. 50.000.000
2. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor sebesar Rp 1.000.000.000
3. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor sebesar Rp. 1.200.000.000
4. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor sebesar Rp. 200.000.000
5. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor sebesar Rp. 150.000.000
6. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor sebesar Rp. 200.000.000
7. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur sebesar Rp. 236.200.000
8. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur sebesar Rp. 200.000.000

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya sebesar Rp. 550.000.000
 10. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 250.000.000
 11. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekretariat sebesar Rp. 230.000.000
 12. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK sebesar Rp. 230.000.000
 13. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 400.000.000
 14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data sebesar Rp. 100.000.000
 15. Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar Rp. 100.000.000
 16. Kegiatan Pengelolaan Data Center Kependudukan sebesar Rp. 200.000.000
 17. Kegiatan Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data) sebesar Rp. 100.000.000
 18. Kegiatan Penyusunan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan sebesar Rp. 50.000.000
 19. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 100.000.000
 20. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil sebesar Rp. 150.000.000
 21. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 150.000.000
 22. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 157.316.000
 23. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Rp. 4.142.684.000
 24. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Internal sebesar Rp. 150.000.000
 25. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 150.000.000
 26. Kegiatan Sinkronisasi Program Perencanaan Disdukcapil Kabupaten/Kota Rp. 150.000.000
- Jumlah Belanja Langsung untuk Tahun 2019 berdasarkan pagu indikatif Rp. **10.596.200.000,-** (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2019 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2019.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2019 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2019 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.